

## DAFTAR PUSTAKA

- Cahyonowati, dkk. 2012. “Peranan Etika, Pemeriksaan, dan Denda Pajak Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 9, No. 2, hlm. 136-153.
- Diana, A., Setiawati, L. (2014). *Perpajakan : Teori dan Peraturan Terkini* : Andi – Yogyakarta.
- Fitria, D. (2017). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Applied Business and Economics*, 30-44.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP
- hestanto. (2018, Maret 15). *Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak*. Retrieved Maret 15, 2018, from hestanto: <https://www.hestanto.web.id/kualitas-pelayanan-terhadap-kepatuhan-wajib-pajak/>
- Inasius, F. (2014, April 5). *Pajak Dan UMKM*. Retrieved Maret 7, 2014, from accounting binus: <https://accounting.binus.ac.id/2014/04/05/pajak-dan-umkm/>
- Juliansyah, N. (2014). *Metodologi Penelitian*, cetakan keempat. Jakarta: Kencana.
- Kusuma, K. C. (2016). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan serta Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Tahun 2014*. Yogyakarta: eprints.uny.
- Krisnaindra. (2016, Oktober 20). *Pengertian Sanksi Pajak*. Retrieved Oktober 20, 2016, from teorieno: <https://www.teorieno.com/2016/10/pengertian-sanksi-pajak.html>

- Lazarde, I. (2016, Maret 10). *Sistem Ketaatan Pajak Harus Ditegakkan*. Retrieved Maret 10, 2016, from republika: <https://republika.co.id/berita/ekonomi/makro/16/03/10/o3t0v2378-sistem-ketaatan-pajak-harus-ditegakkan>
- Mardiasmo.(2018). *Perpajakan* .(Edisi Terbaru 2018) : Andi - Yogyakarta.
- Mardlo, Z. A. (2020, Juni 18). *PPH Final Setengah Persen Dongkrak Pertumbuhan UMKM*. Retrieved Juni 18, 2020, from pajak: <https://pajak.go.id/artikel/pph-final-setengah-persen-dongkrak-pertumbuhan-umkm>
- Nurhimah, D. (2018, Juli 25). *PENGARUH RELIGIUSITAS, PENERAPAN E-FILING DAN BIAYA KEPATUHAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK UMKM (Studi Kasus pada Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo)*. Retrieved Juli 25, 2018, from iain surakarta: <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/2415/1/Dewi%20Nurhalimah.pdf>
- Pajak, O. (2019, Juni 27). *Ini Sanksinya Jika Anda Tidak Melakukan Pembayaran Pajak*. Retrieved Juni 27, 2019, from online pajak: <https://www.online-pajak.com/seputar-pajakpay/sanksi-tidak-melakukan-pembayaran-pajak>
- Pin, B. (2015, Desember 28). *Definisi dan Pengertian Usaha Kecil Menengah (UMKM)*. Retrieved Desember 28, 2015, from hinyong: <https://hinyong.com/usaha-kecil-menengah-adalah/>
- Priyatno, D. (2013). *Analisis korelasi, regresi dan multivariate dengan SPSS*. Yogyakarta: Gava Media.
- Rajif, Mohamad. 2012. "Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan Sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Pajak Pengusaha UKM di Daerah Cirebon". Skripsi. Universitas Gunadarma.

- Resmi, S. (2016). *Perpajakan : Teori dan Kasus* (Edisi kesembilan Buku satu) : Salemba Empat - Jakarta.
- Supadmi, Ni Luh. 2012. “Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan”. Skripsi. Universitas Udayana
- Siahaan, Marihot Pahala. (2013). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah* (Edisi Revisi) : RajaGrafindo Persada - Jakarta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kebijakan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R & D dan Penelitian Evaluasi*: Alfabeta - Bandung.
- Shora, J. (2013, Juni 13). *Fungsi Pajak*. Retrieved Juni 13, 2013, from pajakkoe: <https://pajakkoe.blogspot.com/2013/01/fungsi-dan-klasifikasi-pajak.html>
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 *Keuangan Negara*. 28 April 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Jakarta.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 *Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. 17 Juli 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85. Jakarta.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 15 September 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Jakarta.
- Undang-Undang Republik *Indonesia* Nomor 33 Tahun 2004 *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia* : Salemba Empat - Jakarta.
- Widawati. (2017, November 2). *PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PERPAJAKAN, PENGETAHUANPERATURAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN SANKSIPAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI EMPIRIS WAJIB PAJAK ORANG*

*PRIBADIDIKPP PRATAMA BOYOLALI*). Retrieved November 2, 2017, from  
iain surakarta: <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/1617/1/FULL%20TEKS.pdf>

\_\_\_\_\_. (2017). *Perpajakan : Teori dan Kasus* (Edisi kesepuluh Buku satu) :  
Salemba Empat - Jakarta.